

## **BAB II**

### **DIALEKTIKA MUHAMMADIYAH, POLITIK DAN PERILAKU ELITE**

Muhammadiyah adalah organisasi dakwah yang memiliki konsentrasi perjuangan pada wilayah sosial dan keagamaan di Indonesia. Menjadi salah satu organisasi besar di tanah air, tentu memiliki konsekuensi-konsekuensi gerakan yang mempengaruhi regulasi dan kebijakan pada penguasa sehingga menimbulkan dinamika dalam dialektikanya. Pasang surutpun terjadi, pada hubungan Muhammadiyah dan Negara sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini.

#### **2.1 Sejarah Berdiri Persyarikatan Muhammadiyah**

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H., atau pada tanggal 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis, kemudian nama itu dikenal dengan nama KH. Ahmad Dahlan. KH. Ahmad Dahlan adalah seorang Khatib sekaligus pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta, di samping itu juga seorang pedagang. Di tengah kesibukannya sebagai pedagang, khususnya, melihat kenyataan dan keadaan umat Islam pada waktu itu yang seringkali dijumpai melakukan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak (dakwah) mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yakni kembali kepada Al-Qur`an dan As-Sunnah al-Maqbulah.

Tidak semulus niat baiknya, ajakan itu mendapat penolakan dari sebagian masyarakat, oleh karena dianggap tidak menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka (khususnya masyarakat Jawa), bahkan ada yang menganggap bahwa KH. Ahmad Dahlan “membawa ajaran baru”. Berkat kesabaran, ketekunan, keyakinan

dan strategi dakwah yang dilakukan, akhirnya perlahan-lahan, masyarakat bisa memahami maksud Beliau hingga pada akhirnya dakwahnya dapat diterima bahkan menyebar ke berbagai wilayah di Yogyakarta dan luar Yogyakarta. Guna menopang gerakan dakwahnya yang mulai mendapat sambutan hangat masyarakat, maka didirikanlah Persyarikatan yang bernama Muhammadiyah.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah membutuhkan “rumah” yang berupa organisasi agar mampu mengelola atau mengorganisir kegiatan dakwah. Meski pada akhirnya tidak hanya wilayah dakwah saja, namun meluas hingga wilayah sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. KH. Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 sampai dengan tahun 1922. Dasar berpikir KH. Ahmad Dahlan sebagaimana tertuang dalam al-Qur`an surat Ali Imron (3) ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Gagasan cerdas KH. Ahmad Dahlan yang dibangun dari kesadaran atas pemahaman al-Qur`an pada surat dan ayat tersebut di atas, guna “diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari” diamini oleh teman-teman seperjuangannya di Budi Utomo dan Syarekat

Islam, maka berdirilah Muhammadiyah dengan formasi Pimpinan Pusat (*Hoofdbestuur*): Haji Ahmad Dahlan (*Ketib Amin*), Abdullah Siraj (*Penghulu*), Haji Ahmad (*Ketib Cendana*), Haji Abdul Rahma, R. Haji Sjarkawi, H. Moehammad (*Mas Gebejan*), R. Haji Djaelani, Haji Anis (*Akis*), dan Haji Mohammad Fakih (*Mas Tjarik*) (A. Jainuri, 2002, 118).

Ada dua faktor yang melatarbelakangi KH. Ahmad Dahlan di dalam merespon perkembangan masyarakat muslim saat itu. Pertama faktor internal, Ahmad Dahlan prihatin atas perilaku masyarakat yang dianggap jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, seperti *taqlid* yang membudaya di masyarakat, *khurafat* dan *syirik* bercampur aduk dengan aqidah, maka dirinya berniat untuk mengembalikan semuanya kepada pemurnian Islam, yakni kembali kepada al-Qur`an dan al-Sunnah al-Maqbullah. Karena belum ada sejenis lembaga yang mampu mewadahi, maka Ahmad Dahlan menitikberatkan pada gerakan sosial keagamaan. Kedua, faktor eksternal, semakin meningkatnya gerakan kristenisasi yang diinisiasi oleh pemerintah Belanda dan penyebarannya sudah cukup mengkhawatirkan aqidah islamiyah masyarakat muslim, maka respons besar KH. Ahmad Dahlan dilakukan dalam rangka membendung arus itu (Alwi Shihab, 1998, 126).

Muhammadiyah berkomitmen pada aqidah Islam yang benar bersumber dari al-Qur`an dan al-Sunnah sebagaimana tertuang dalam Anggaran dasarnya yang bertujuan *Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya* (Pimpinan Pusat Muhammadiyah: 2005).

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi sosial keagamaan yang besar dan tumbuh berkembang secara dinamis di

Nusantara. Kelahirannya ditandai oleh semangat pembaharuan dalam Islam yang konsisten, meski demikian Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi sosial Islam tidaklah sekadar mengurus persoalan agama saja bahkan lebih luas lagi, yakni bidang pendidikan yang melahirkan lembaga pendidikan sejak dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi; kesehatan, yang melahirkan balai kesehatan seperti PKU. Muhammadiyah; sosial dan budaya, yang melahirkan panti asuhan, lembaga sosial, LazisMU dan produk-produk media; berikutnya ekonomi, yang melahirkan amal usaha Muhammadiyah; dan politik, yang melahirkan tokoh-tokoh kemerdekaan, pendidikan dan politik, seperti Panglima Besar Jendral Soedirman, Ki Bagus Hadikusumo, KH. AR. Fachruddin, HM. Amien Rais, dan lain sebagainya.

Memahami peran serta Muhammadiyah di dalam membangun bangsa, kedewasaannya ditandai oleh kontribusinya yang luas sehingga Muhammadiyah elegan serta lentur di dalam berinteraksi dengan persoalan-persoalan sosial-budaya, dan adaptatif di bidang politik. Hal itu terlihat profil Muhammadiyah yang diwakili oleh para kadernya yang moderat-akomodatif baik itu hubungannya, secara vertikal, dengan pemerintah dan secara horizontal, dengan lapisan masyarakat. Mungkin, inilah yang disebut Muhammad Amien Rais sebagai *high politics* yakni politik adiluhung yang bermuatan moral dan etik (M. Amien Rais, 1995, 73; dan Ahmad Syafi'i Maarif, 1995, 7). Muatan moral dan etik di sini, dapat dipahami bahwa berpolitik bukan hanya soal kekuasaan saja melainkan lebih dari itu, yakni *amar ma'ruf nahi munkar*. Mewujudkan masyarakat yang bermartabat adalah salah satu yang mesti dicapai melalui jalan politik.

Secara faktual, ikhtiar mewujudkan pemerintahan yang baik agar tercipta masyarakat yang berkemajuan dan bermartabat, bukanlah persoalan mudah. Seringkali Muhammadiyah cukup “sulit bersikap” dengan pemerintah sebagai penguasa sejak zaman penjajahan/pemerintahan Belanda menjelang kemerdekaan. Meski dianggap hanya organisasi yang bergerak di arena sosial kemasyarakatan saja, Muhammadiyah kadangkala *ngeli* dalam situasi politik oleh karena terbatasnya akses dan gerak politik yang dilakukan. Mungkin inilah yang melatari argumen, bahwa peran maupun respon Muhammadiyah dalam dinamika politik Indonesia lebih ditentukan oleh watak rezim berkuasa, walaupun demikian, secara umum peran Muhammadiyah ditandai oleh ketegantungan yang dominan kepada pemerintah berkuasa, jika bukan suatu kooptasi dan hegemoni (Syarifuddin Jurdi, 2008, 1).

Sehubungan posisi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang menonjol bergerak pada wilayah sosio-kultural, perannya pada wilayah politik sangat terbatas sesuai dengan identitasnya sebagai gerakan sosial Islam (*Ibid*). Seiring kedewasaan Muhammadiyah di dalam menjalani rentang dan waktu serta bersinggungannya dengan ranah politik, masa Orde Baru pun Muhammadiyah mampu bersikap, meski realitanya menjaga jarak dengan pemerintah, namun hubungan komunikasi sosial, budaya, ekonomi dan politik berjalan dinamik.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah menjelaskan, bahwa keberadaan Muhammadiyah merupakan Jam`iyah Diniyah, yakni Gerakan Islam, Dakwah Amar Ma`ruf Nahi Munkar, dan Tajdid, yang bersumber pada al-Qur`an dan al-Sunnah (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, 30). Sebagai gerakan tajdid, Muhammadiyah mendasarkan gerakannya

pada amal usaha dan prinsip-prinsip yang tertulis dalam Muqaddimah Anggaran dasarnya, yakni hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah; hidup manusia bermasyarakat; mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu adalah satu-satunya landasan kepribadian ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia-akhirat; menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlas kepada kemanusiaan; *ittiba`* kepada langkah perjuangan Rasulullah Saw; dan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi (Haedar Nashir, 2005, 102).

Kontekstualisasi dengan politik di Indonesia, Muhammadiyah tidak pernah menyatakan diri sebagai partai politik yang mempunyai kegiatan politik praktis. Sesuai dengan penegasan yang dikandung dalam *matan* kepribadiannya, dimensi politik Muhammadiyah muncul dalam rangka dakwah *amar ma`ruf nahi munkar* (Syamsul Hidayat, 2010). Dakwah *amar ma`ruf nahi munkar* dilakukan Muhammadiyah dalam rangka mencari ridla Allah Swt. Tidak sekadar berceramah, melainkan lebih dari itu, disiapkan semua sarana dan prasarana di dalam mengawal dakwahnya. Wajar, jika pada akhirnya Muhammadiyah mampu masuk ke dalam lini masyarakat, baik itu sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

## **2.2 Muhammadiyah dan Sejarah Kemerdekaan**

Lahirnya Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Beberapa putra bangsa terbaik seperti KH. Ahmad Dahlan mencoba meresponnya dengan membangun atau mendirikan organisasi dakwah sosial keagamaan. Ikhtiar itu dilakukan dalam rangka menyatukan gagasan-gagasan atau

semangat dan komitmen rakyat Indonesia di dalam mewujudkan cita-cita mulia itu, yakni kemerdekaan. Bagi Ahmad Dahlan, organisasi adalah wadah bagi seluruh umat Islam khususnya di wilayah Yogyakarta untuk memfokuskan garis perjuangan agar terorganisir baik dan tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Meski demikian, tidaklah semua itu mudah dilakukan. Karena situasi saat itu dalam kondisi penjajahan Belanda sedang berlangsung.

Di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, juga terjadi perlawanan atas penjajahan Belanda. Salah satu bentuk perlawanan itu dapat dilihat dari munculnya berbagai organisasi sosial dan politik yang dimotori kaum muda dengan berbagai nama, seperti Partai Syarekat Islam (PSI), Majelis Islam A`la Indonesia (MIAI), dan Masyumi. Dalam rangka menelusuri latar historis dan dinamika Muhammadiyah dalam sejarah kemerdekaan, penting kiranya menjelaskan secara runtut perihal kronologis sejarahnya.

Secara historis, pergerakan umat Islam di dalam merespon cita-cita kemerdekaan, secara institusional politik, dicatat oleh Endang Saifuddin Anshari meliputi beberapa rangkaian sejarah. Dimulai tahun 1905 berdirinya Syarekat Dagang Islam (SDI) oleh Haji A. Samanhudi di Surakarta, berikutnya tahun 1911 berubah nama menjadi Syarekat Islam (SI), dan pada tahun 1923 berubah nama lagi menjadi Partai Syarekat Islam (PSI), kemudian tahun 1927 berubah nama lagi menjadi Partai Syarekat Islam Hindia Timur (PSIHI) (Endang Saifuddin Anshari, 2004, 203-204). Tahun 1930-an, PSIHI berubah nama lagi menjadi Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) yang dimotori oleh Haji A. Samanhudi, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, SM. Kartosoewirjo, Dr. Sukiman Wirjosardjojo, Abikosno Tjokrosjojoso, Haji Agoes Salim, Anwar

Tjokroaminoto, Sjekh Marhaban, dan Ch. Ibrahim (*Ibid*). Penting diketahui, bahwa Pada kongres PSI tahun 1929 menegaskan tujuannya soal perjuangan yang dilakukan adalah mencapai kemedekaan nasional. Karena itulah PSI ditambah kata “Indonesia”, sehingga menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII).

Tahun 1932, berdirilah Persatuan Muslimin Indonesia di Minangkabau di pimpin oleh Muchtar Lutfi. Tahun 1934 berdirilah Partai Arab Indonesia dipelopori oleh AR. Baswedan. Pada tahun 1937 atas inisiatif KH. Mas Mansur dan KH. Ahmad Dahlan dibentuklah Majelis Islam A`la Indonesia (MIAI) sebagai wadah perkumpulan Islam yang mampu Berjaya dua tahun lamanya hingga Jepang datang. Tahun 1938, berdirilah Partai Islam Indonesia (PII) yang dipelopori oleh Dr. Sukiman Wirjosandjojo, Wiwoho, Ki Bagus Hadikusumo, Wali al-Falah, Faried Makmur, Abdul Kahar Muzakir, Mr. Kasman Bahuwinangun, Muhammad Natsir, dan sebagai penasihatnya adalah KH. Mas Mansur. Pada tahun 1943 di deklarasikanlah Masyumi yang menggantikan MIAI (Masykuri Abdullah, 1999; dan Abdolkarim Soroush, 2000, 122).

Analisis Endang Saifuddin Anshari terlihat bahwa alasan mendasar lahirnya kelompok atau partai-partai tersebut oleh karena respon politik yang melatarinya. Data lain yang berbeda dapat dilihat pada kajian yang dilakukan oleh Deliar Noer yang menyebutkan bahwa Syarekat Islam pertama berdiri pada 11 November 1912 yang dilatari oleh respon atas penguasaan dan monopoli dagang dibidang bisnis batik oleh etnis China, kemudian proteksi atas tekanan pribumi bangsawan, dan membendung arus kristenisasi oleh imperialisme Belanda (Deliar Noer, 1988, 115).



Berdasarkan ketiga alasan mendasar, sebagaimana diungkap Deliar Noer, bahwa problematika lahirnya kelompok atau partai-partai yang ada, adalah gejala dan gejolak sosial atas persoalan yang sedang berlangsung. Dari berbagai latar belakang aliran atau partai-partai yang muncul saat itu, hingga mendekati dan bahkan kemerdekaan itu telah berhasil didapatkan, mereka masih tetap bisa satu visi, yakni mewujudkan kemerdekaan Indonesia.

Tetapi persoalan menjadi *complicated* ketika usai kemerdekaan dan visi Indonesia soal Dasar Negara mulai diperbincangkan. Ada *geup* antara kelompok Islam dan Nasionalis soal ideologi Negara. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mr. Radjiman Wediodiningrat yang memiliki tugas utama bersama BPUPKI ini menyusun rancangan Undang-undang Dasar. Pada sidang pertama, tanggal 29 Mei 1945, yang pertama-tama dibahas adalah dasar negara sebelum ada pembahasan Undang-undang Dasar (Endang Saifuddin Anshari, 1983, 14; dan Mahfud MD, 2003, 28).

Fakta sejarah mencatat, kiprah politik Muhammadiyah di tengah konstalasi sosio-politik di Indonesia dalam perjuangan partai Islam terlihat sejak tahun 1938, setelah Partai Syarekat Islam (PSI) mengambil tindakan disiplin terhadap Muhammadiyah dan Persatuan Islam (PERSIS), tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama organisasi Islam lainnya mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) (Deliar Noer, 1987). Kondisi ini juga berjalan pada masa perjuangan partai-partai, dengan menempatkan diri sebagai anggota istimewa partai, seperti dalam Masyumi dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) pada awal berdirinya. Kebijakan pemerintah tentang penyederhanaan partai, maka Muhammadiyah

lewat dua muktamarnya, masing-masing Mukhtar 37 di Yogyakarta dan Mukhtar 38 di Ujung Pandang menegaskan kembali sikapnya bahwa kegiatan politik praktis bukanlah bidang garap Muhammadiyah (M. Yunan Yusuf, 1990).

Di masa Orde Baru, dimensi politik Muhammadiyah muncul dalam bentuk kontribusi saran-saran, pertimbangan dan pandangan-pandangan terhadap lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, terutama dalam bidang pendidikan dan keagamaan. Praktis Muhammadiyah hanya mengandalkan kekuatan lobinya terhadap pihak-pihak pengambil keputusan di bidang politik, dengan misi utamanya “membela kepentingan Islam dan umatnya” (Syamsul Hidayat, 2012).

Kekuatan organisasi sosial keagamaan Muhammadiyah menjadi perekat umat benar-benar mewujudkan dalam masyarakat Indonesia, meskipun tidak berpolitik praktis, Muhammadiyah mampu membangun komunikasi politik secara dinamik, seperti memberikan saran kepada pemerintah berkaitan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kemudian memberikan pertimbangan dan pandangan-pandangan dalam bidang pendidikan dan sosial budaya baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Peran aktif sebagaimana dilakukan Muhammadiyah sejak kemerdekaan hingga saat ini semakin menguatkan arti penting keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah sosial keagamaan yang modern dan mampu menjawab tantangan jaman.

### **2.3 Muhammadiyah dan Orde Baru**

Sejarah pemerintahan di Indonesia mencatat, bahwa sampai saat ini Orde Baru merupakan rejim yang kuat bertahan selama lebih kurang 32 tahun. Meski diakui, cukup banyak perkembangan

dan pembangunan yang dilakukan tetapi juga berbanding lurus dengan mengakar kuatnya Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan tekanan politik diberbagai elemen terjadi, seperti matinya kebebasan pers, dan lain sebagainya.

Konstalasi politik di Indonesia menunjukkan, bahwa Pancasila pernah dijadikan sebagai satu-satunya asas bagi seluruh organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Secara resmi, pemerintah menetapkan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Untuk organisasi kemasyarakatan dicetuskan secara resmi pada bulan Agustus 1982, serta rancangan Undang-undangnya disetujui DPR tanggal 13 Mei 1983. Semua organisasi kemasyarakatan harus mencantumkan Pancasila sebagai satu-satunya asas di Indonesia.

Bagi Muhammadiyah, bukan persoalan mudah menyikapi persoalan Asas Tunggal yang menjadi satu-satunya asas. Pro dan kontra dalam internal Muhammadiyah terjadi cukup hebat, meski diakui cukup banyak warga Muhammadiyah yang masuk ke dalam Golkar sebagai partai pemerintah saat itu cenderung menerima. Namun pimpinan Muhammadiyah yang konsisten dengan kepribadian Muhammadiyah, seperti Buya Abdul Malik Ahmad, H.S. Projokusumo dan beberapa kalangan dari Sumatera Barat dan Sulawesi cenderung menolak. Alasannya, bagaimana mungkin sebuah gerakan dakwah Islam seperti Muhammadiyah tidak berasaskan Islam. Namun Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat mngantisipasi pro dan kontra tersebut dengan mengambil kebijakan bahwa pembicaraan masalah Asas Tunggal untuk keluar hanya melalui satu pintu juru bicara, yaitu Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebijakan itu berhasil menyatukan sikap dan pendapat warga Muhammadiyah se-Indonesia. Sikap dan kebijakan Muhammadiyah tersebut dikukuhkan dalam Sidang Tanwir

Muhammadiyah, pada bulan Mei 1983 dengan keputusan sebagai berikut (Lukman Harun, 1986, 37-38):

1. Muhammadiyah setuju memasukkan Pancasila dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan tidak mengubah Asas Islam yang ada sekarang ini.
2. Masalah tersebut adalah masalah nasional yang dihadapi Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara nasional. Oleh karena itu Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan lain-lain tidak dibenarkan untuk mengeluarkan pendapat atau mengambil sikap mengenai Asas Tunggal.
3. Pembahasan mengenai hal tersebut akan dilakukan dalam Muktamar ke-41 yang akan datang (*Ibid*).

Upaya-upaya lobi politik dilakukan Muhammadiyah dalam rangka melakukan koordinasi, negosiasi dan memberi pengertian pemerintah bahwa setiap organisasi Islam memiliki asas Islam sebagai asas organisasi. Akhirnya membawa hasil, dan presiden Soeharto saat itu, menyatakan bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak akan dijadikan atau menggantikan agama. Dalam pertemuan dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 22 September 1983, presiden Soeharto menyatakan bahwa identitas dan ciri-ciri Muhammadiyah sebagai ormas Islam dapat ditegaskan dan dijelaskan seluas-luasnya pada pasal-pasal identitas, lalu pasal asas adalah Pancasila, hal itu tentu lebih baik (Lukman Harun, 1985).

Hasil terpenting Muktamar Muhammadiyah tentang perubahan Anggaran dasar dengan ditetapkannya Pancasila sebagai Asas organisasi Muhammadiyah dalam konteks berkehidupan berbangsa dan bernegara. Asas ini tercantum dalam pasal 2 Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan terlebih dahulu

ditegaskan identitas Muhammadiyah dalam pasal 1 ayat 1 bahwa Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam dan dakwah amar am`ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada al-Qur`an dan al-Sunnah. Di samping itu, pada bagian penjelasan dinyatakan bahwa penerimaan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai asa adalah dengan pengertian bahwa Sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah keimanan kepada Allah atau Tauhid (Djarnawi Hadikusumo, 1990, 16).

Melihat dinamika politik yang terjadi dalam tubuh Muhammadiyah dalam relasinya dengan penguasa Era Orde Baru, Muhammadiyah telah melakukan perubahan Anggaran Dasar pada Muktamar ke-44 tahun 2000 dengan menetapkan bahwa Islam sebagai Asas Organisasi Muhammadiyah. Pada Bab 1 tentang Nama, Identitas dan Tempat Kedudukan pasal 1 ayat 2 berbunyi: *Muhammadiyah adalah Gerakan islam dan Dakwah Amar Ma`ruf Nahi Munkar, berasaskan Islam, dan bersumber pada al-Qur`an dan al-Sunnah.* Dengan demikian, sejak tahun 2000 Muhammadiyah kembali berasaskan Islam (Anggaran Dasar Muhammadiyah, 2000; dan Mahasri Shobahiya et. al, 2005, 196).

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang tahun 2005 ditegaskan lagi dengan rumusan yang tercantum dalam Bab II pasal 4 tentang Identitas dan Asas, sebagai berikut: “Ayat (1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam Dakwah Amar Ma`ruf Nahi Munkar dan Tajdidi, bersumber pada al-Qur`an dan al-Sunnah, ayat (2) Muhammadiyah berasaskan Islam”. Demikian juga rumusan tujuan Muhammadiyah dikembalikan kepada rumusan lama yang berbunyi: “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya” (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005).

Beberapa kajian mencatat, bahwa Muhammadiyah selalu berhati-hati dalam menghadapi dinamika politik yang berkembang. Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik, jati diri Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan. Kiprah Muhammadiyah dalam politik lebih pada sikap Muhammadiyah memainkan fungsi lobi dan pendekatan-pendekatan yang lentur yang banyak dipengaruhi budaya akomodatif sehingga tidak menimbulkan konfrontasi yang ekstrim.<sup>1</sup> Budaya politik yang akomodatif sudah menjadi ciri politik Muhammadiyah dan dilandasi dengan prinsip gerakan sehingga tidak keluar dari komitmen Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan statusnya sebagai organisasi sosial keagamaan dapat memainkan fungsi politiknya melalui amal usaha seperti pendidikan dan kesehatan. Peran-peran Muhammadiyah dalam amal usahanya sedikit banyak mempengaruhi pemerintah. Pemerintah dalam perannya mencapai tujuan Negara tidak dapat berjalan sendiri. Muhammadiyah hadir untuk membantu pemerintah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Bisa disimpulkan bahwa antara pemerintah dan Muhammadiyah saling melengkapi dan membantu (*Ibid*).

Selama periode Orde Baru, Muhammadiyah mengalami suatu hubungan yang cukup rumit dengan pemerintah. Rezim Soeharto merupakan bentuk pemerintahan yang secara totaliter berafiliasi ke militer yang bertujuan mengontrol pikiran dan tindakan masyarakat. Pada situasi tertentu, Soeharto dianasirkan sebagai tokoh yang anti-Islam, tetapi dalam situasi politik tertentu, menjadi pro-Islam.

Rezim Soeharto memiliki kontrol kuat terhadap masyarakat. Aksi dukungannya terhadap Islam adalah dalam

---

<sup>1</sup><http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4858/4406>.

rangka mengontrol masyarakat dari “hulu” ke “hilir”. Di samping juga terdapat motif-motif menghapus semua sisa-sisa komunisme. Beberapa “lembaga” yang “didirikan” pemerintah sebagai institusi-institusi islamisasi, atau menurut M.C. Ricklefs sebagai “pendalaman Islamisasi” (M.C. Ricklefs, 2013, 327), seperti Pendidikan Tinggi Dakwah Islam, Proyek Pembinaan Mental Agama, Majelis Ulama Indonesia, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila dan tempat ibadah lainnya.

#### **2.4 Muhammadiyah dan Konsep *Amar Ma`ruf Nahi Munkar***

Peran Muhammadiyah dipentas politik nasional sangat penting dan diperhitungkan oleh negara, meskipun Muhammadiyah bukan partai politik. Muhammadiyah adalah gerakan dakwah sosial keagamaan dan memiliki kedekatan dengan partai politik. Hal itu dapat ditelusuri ketika tanggal 7 dan 8 November tahun 1945, Muhammadiyah pernah menjadi anggota istimewa di tubuh organisasi Masyumi. Selalu saja terjadi tarik-menarik antara Muhammadiyah di tubuh Masyumi sebagai partaikaah atau sisi lain sekadar menjadi anggota istimewa. Posisi ini menjadi pembicaraan hangat pada Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1956 di Yogyakarta guna memastikan status Muhammadiyah di dalam tubuh Masyumi. Hingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah melaksanakan Pleno tahun 1959 dan memutuskan untuk keluar dari Masyumi.

Era Reformasi, Muhammadiyah menunjukkan keberaniannya dalam ranah politik seiring dengan arus besar keinginan masyarakat untuk mengembalikan potensi politik bangsa Indonesia. Di sinilah terjadi pematangan dan implementasi gerakan *amar ma`ruf nahi munkar* dalam aspek politik yang sudah dirancang dan dimatangkan cukup lama pada masa Orde Baru. Pada Sidang Tanwir 1998 di Semarang (setahun setelah jatuhnya

rezim Orde Baru), peluang Muhammadiyah untuk menjadi Partai politik cukup besar. Namun rupanya keputusan Sidang Tanwir tersebut sangat dewasa, dengan menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik. Warga Muhammadiyah dipersilahkan mendirikan partai politik atau bergabung dengan partai yang ada, dan secara institusional tidak ada hubungan antara partai politik manapun dengan Muhammadiyah.<sup>2</sup>

Bagaimana Muhammadiyah melihat agama? Bagi Muhammadiyah, agama merupakan ajaran yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyatu dalam kehidupan bangsa Indonesia. Agama sebagai sumber nilai utama yang fundamental berfungsi sebagai kekuatan transendental yang luhur dan mulia bagi kehidupan bangsa. Nilai-nilai instrinsik keagamaan memberikan inspirasi bagi para pendiri bangsa dan perumusan cita-cita Negara dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berbasis pada ajaran agama. Nilai-nilai agama bahkan tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi Negara. Agama bukan hanya kumpulan tuntunan ritual ibadah dan doktrin moral yang terkandung dalam ajaran kitab suci. Lebih dari itu, merupakan model perilaku yang tercermin dalam tindakan nyata yang mendorong penganutnya memiliki watak jujur dan dipercaya, dinamis, kreatif, dan berkemajuan (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015).

Karenanya, agama bagi kehidupan bangsa Indonesia dapat dijadikan sebagai sumber nilai kemajuan. Nilai-nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran

---

<sup>2</sup><http://aika.uhamka.ac.id/muhammadiyah-sebagai-gerakan-amar-makruf-nahi-munkar-dalam-politik/>.



akan masa depan yang lebih baik,pendayagunaan sumber daya alam secara cerdas dan bertanggungjawab, inovasi atau pembaharuan, kebersamaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa padakemajuanhidup bangsa. Atas dasar pengertian tersebut, maka konsep *Amar Ma`ruf Nahi Munkar* dalam Muhammadiyah merupakan hasil dari penggalian nilai-nilai agama Islam yang digunakan untuk melakukan dakwah yang berkemajuan bagi bangsa dan Negara Indonesia agar lebih baik lagi dan maju.

*Amar ma`ruf nahi munkar* adalah gerakan dakwah Muhammadiyah yang bersumber dari al-Qur`an surat Ali Imron, ayat 104. Maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Wujud implementasinya, bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah *amar ma`ruf nahi munkar*. Dalam konteks politik dan dakwah, Muhammadiyah senantiasa menganjurkan kepada segenap anggotanya yang aktif dalam politik khususnya, agar sungguh-sungguh mengedepankan tanggung jawab (*amanah*), akhlak mulia (*akhlaq al-karimah*), keteladanan (*uswah hasanah*), dan perdamaian (*ishlah*). Aktifitas politik dan dakwah tersebut harus sejalan dengan upaya memperjuangkan misi Persyarikatan dalam melaksanakan dakwah *amar ma`ruf nahi munkar*. Maka dari itu, Muhammadiyah senantiasa bekerjasama dengan pihak atau golongan mana pun berdasarkan prinsip kebajikan dan kemaslahatan, menjauhi kemudharatan, dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang berkeadaban.

Memasuki abad ke-2 Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kader mendiskusikan pemikiran dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, salah satunya adalah pemikiran Muhammad Amien Rais terkait dengan perlunya kontekstualisasi doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* dengan fokus *al-Amru bil 'adli wa an-nahyu 'anil dhulmi* yang telah disampaikan pada pembukaan Mukhtamar ke-47 di Makassar tahun 2015. Salah satu prinsip dari gerakan Muhammadiyah yang terus dipelihara dan dikembangkan oleh para kader Muhammadiyah adalah semangat kepeloporan (*pioneering spirit*). Gerakan dakwah Muhammadiyah dengan konsep *al-Amru bil 'adli wa an-nahyu 'anil dhulmi* menjadi lebih relevan untuk memberikan respon kepada situasi ketidakadilan serta kedhaliman yang terjadi. Jihad Konstitusi menjadi salah satu *best practice* dari implementasi semangat *al-Amru bil 'adli wa an-nahyu 'anil dhulmi*, dalam jihad konstitusi ini kemudian bagaimana menggunakan doktrin agama yang sering dikaitkan dengan perlawanan fisik kemudian dijadikan landasan perjuangan dalam melawan konstitusi yang merugikan masyarakat. *Best practice* ini juga kemudian diimplementasikan dalam spirit *al-Maun* yang digerakkan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang lebih baik lagi.<sup>3</sup>

Haedar Nashir berpendapat, bahwa Muhammadiyah menempatkan Islam sebagai pandangan dunia (*world view*). Artinya, Islam menjadi ukuran sekaligus barometer di dalam memahami persoalan apapun, termasuk persoalan politik. Muhammadiyah lebih memilih bercorak moderat dalam dunia politik, yang berbeda dengan paham integralisme dan sekularisme, sehingga Muhammadiyah lebih menekankan pada nilai-nilai

---

<sup>3</sup><http://www.suaramuhammadiyah.id/2016/01/18/kontekstualisasi-doktrin-amar-maruf-nahi-munkar/>.

aktualisasi politik ketimbang pada formalisasi struktur dan menghimpitkan agama dengan politik (paham integralisme) atau sebaliknya yang membebaskan politik dari nilai agama (sekular). Politik bukan hanya menyangkut perjuangan kekuasaan dalam struktur pemerintahan atau Negara, tetapi juga berkaitan dengan pembangunan bangsa dengan berbagai urusannya yang mengurus hajat hidup orang banyak menuju pada kebaikan.

Muhammadiyah sebagaimana pandangan *khittah* Denpasar 2002 berpandangan bahwa politik merupakan *al-umur al-dunyawiyat*, yakni urusan dunia yang di satu pihak harus dijiwai nilai-nilai moral Islam tetapi formatnya bersifat *ijtihadiah*. Dalam konteks ini, pembagian kerja antara organisasi dakwah dan politik menjadi penting dalam menggarap lahan dakwah dan politik untuk kepentingan strategi sekaligus bersifat realistik, sehingga umat Islam bergerak lebih taktis dan tidak utopis (Haedar Nashir, 2010, 188). Dari sini, maka langkah tehnik *amar ma`ruf nahi munkar* akan lebih realistis ketika diterapkan pada lapangan dakwah.

Penting untuk digarisbawahi, bahwa Muhammadiyah bersungguh-sungguh di dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai suatu bentuk konkret dari pengejawentahan konsep *amar ma`ruf nahi munkar*. Usaha-usaha Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini tidak lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah tersebut. Usaha-usaha tersebut diformulasikan dalam sejumlah langkah pokok sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (2005, pasal 3), yakni:

1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaram Islam dalam berbagai aspek kehidupan,

2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya,
3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sadaqah, hibah dan amal salih lainnya,
4. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi dan berakhlak mulia,
5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta meningkatkan penelitian,
6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas,
7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,
8. Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan,
9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri,
10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan,
12. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk menyukseskan gerakan,
13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat, dan
14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah (*Ibid*).

Muhammadiyah telah berkiprah siang malam di seluruh lini kehidupan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentunya melalui dakwah *amar ma`ruf nahi munkar*.

## 2.5 Dakwah dan Politik: Dua Hakikat dalam Satu Jasad

Berpolitiknya Muhammadiyah berbeda dengan berpolitiknya partai politik. Sebagaimana diatur dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah; Kepribadian Muhammadiyah; Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah; *Khittah* Perjuangan Muhammadiyah; *Khittah* dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara; dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, serta Keputusan-Keputusan Muktamar dan Tanwir-nya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, dan *amar ma`ruf nahi munkar* yang bersifat nonpolitik.<sup>4</sup>

Menurut Hajriyanto Y. Thohari, Muhammadiyah mempunyai banyak pengalaman panjang yang dapat dijadikan preseden dan inspirasi bagaimana berpolitik secara kontekstual. Muhammadiyah harus mengkaji manfaat dan *mudharat*-nya "memiliki" parpol. Ijtihad politik di masa lalu terbuka untuk dievaluasi dan direformulasikan kembali sesuai konteks dan logika situasi yang menyertainya. Sebagai contoh, Tanwir Tahun 1955 Muhammadiyah mengevaluasi keterlibatannya secara institusional dalam Masyumi sebagai anggota istimewa karena dirasa merugikan dakwah yang menjadi misi utamanya. Padahal, bagi

---

<sup>4</sup><http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/05/07/nnyu079-muhammadiyah-berpolitik>.

Muhammadiyah, politik itu meski penting hanyalah faktor komplementer. Komentar Hajriyanto (*Ibid*),

“..Maka dari itu, sidang tanwir (1939) memandang wadah politik tersebut harus berada di luar struktur kelembagaan Muhammadiyah. Secara terperinci, rumusannya adalah bagi Muhammadiyah (1) politik itu penting, tetapi (2) tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah. Jika Muhammadiyah ingin berjuang di bidang politik maka (3) harus dibuat wadah tersendiri yang (4) berada di luar struktur yang (5) tidak berhubungan secara organisasional dengan Muhammadiyah, tetapi (6) keduanya—Muhammadiyah dan parpol "milik"-nya itu—harus bisa bekerja sama secara simbiosis mutualisme untuk dakwah. Dan last but not least, (7) dalam mengembangkan parpol ini harus bekerja sama dengan kekuatan bangsa dan umat Islam lainnya.

Mengapa wadah politik itu mesti di luar Muhammadiyah yang tidak berhubungan secara institusional? Jawabnya karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, bukan organisasi politik, bahkan tidak memiliki afiliasi dengan—dan sampai kapan pun tidak akan menjadi—parpol. Tetapi, sangat meyakinkan bahwa untuk mewujudkan cetak biru berdasarkan pandangan dunianya, Muhammadiyah memerlukan bukan hanya strategi kebudayaan, melainkan juga politik..” (*Ibid*).

Pandangan di atas, menunjukkan bahwa dakwah dan politik merupakan satu keping mata uang, antara sisi satu dan sisi lainnya tak bisa dipisahkan.

Penting melihat sisi lain dari pandangan Azyumardi Azra, menurutnya Muhammadiyah dalam berbagai keluasan ruang geraknya mampu membuat daya tekan politik (*political leverage*). Meskipun bukanlah organisasi politik. Muhammadiyah lahir bukan untuk mendirikan partai politik. Azyumardi meyakini bahwa Muhammadiyah tidak terlalu kondusif untuk membuat partai politik karena tradisinya dakwah pendidikan dan dakwan sosial.<sup>5</sup>

Bagi Azyumardi Azra, Muhammadiyah tetap hadir sebagai *civil society* dan sekaligus memainkan peran sebagai “kelompok penekan” (*pressure group*). Salah satu faktor kebertahanan Muhammadiyah sepanjang sejarah dalam menjalankan misinya adalah kemampuannya memelihara jarak dengan negara, kekuasaan, dan politik sehari-hari. Muhammadiyah dalam banyak perjalanan sejarahnya cenderung menghindarkan diri dari keterlibatan langsung dalam politik, apakah "politik negara" (*state politics*) maupun "politik kepartaian" (*party politics*), atau politik kekuasaan (*power politics*). Dengan tindakan politik seperti itu, menurut Azyumardi Azra, Muhammadiyah dapat memelihara karakter dan *muruah*-nya sebagai organisasi *civil society*.

Pandangan Azyumardi Azra di atas, menunjukkan bahwa Muhammadiyah di dalam berelasional dengan Negara pun memiliki dinamika sebagaimana dengan dakwah itu sendiri. Hanya saja, hubungan dakwah dan politik dalam Muhammadiyah lebih menunjukkan sisi fungsionalnya, sementara hubungannya dengan Negara, Muhammadiyah menunjukkan sisi dialektikanya.

---

<sup>5</sup><http://news.metrotvnews.com/read/2015/08/04/418105/azyumardi-ingatkan-din-muhammadiyah-pernah-gagal-bikin-parpol>.

## 2.6 Dilema Muhammadiyah dalam Politik Praktis

Bukan persoalan mudah memposisikan Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan nasional di tanah air. Dari sekian organisasi sosial dan keagamaan, hanya Muhammadiyah yang bersikap tegas bahwa keterlibatan warga Muhammadiyah dalam politik praktis tidak mencerminkan dan mewakili organisasi Muhammadiyah. Diawali sejak pembentukan Partai Islam Indonesia dan Masyumi, kader-kader Muhammadiyah terlibat di dalam ikut serta memotori pembentukan partai-partai tersebut sekaligus menjadi salah satu *leader*-nya. Meski tidak mendapat mandat secara tertulis dan resmi dari Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah saat itu seakan ”memahami” posisi dan sikap Muhammadiyah terhadap politik, sehingga mereka berpolitik yang cerdas dan santun agar dikemudian hari menjadi *uswah* bagi umat Islam di dalam membangun bangsa melalui partai politik. Bahkan hingga saat ini, kader-kader Muhammadiyah berpolitik tidak semua mendapat mandat atau perintah resmi dari Muhammadiyah untuk menjadi kontestan partai Islam tertentu (Zuly Qodir dkk, 2015, 116-117).

Penting melihat kembali sejarah perjalanan politik Muhammadiyah khususnya di tingkat elite Muhammadiyah tentang keterlibatannya dalam politik praktis. Muhammadiyah lahir tidak dikonstruksi sebagai partai, tapi sebatas "gerakan politik", tentunya selain gerakan dakwah *amar ma`ruf nahi munkar*. Konstruksi sebagai gerakan politik tergambar dari langkah KH. Ahmad Dahlan yang menjalin relasi politik dengan banyak pihak. Dekat dengan Budi Utomo, Syarekat Islam, KH. Misbah (partai komunis), dan termasuk kalangan Ahmadiyah. KH. Mas Mansur



terlibat pendirian Partai Islam Indonesia, dan bersama NU dan PSII, Muhammadiyah mendirikan MIAI pada 1937.<sup>6</sup>

Ketika lahir Masyumi yang difasilitasi Jepang pada 1943, Muhammadiyah pun terlibat. Begitu juga ketika lahir Masyumi yang dibidani umat Islam pada 1945 dan berubah menjadi partai pada 1947, Muhammadiyah bersama NU menjadi anggota istimewa. Keterlibatannya di Masyumi berakhir selepas Muhammadiyah menanggalkan anggota istimewanya pada tahun 1959 (*Ibid*).

Menurut kajian Ma`mun, saat transisi politik dari Orde Lama ke Orde Baru, Muhammadiyah dihadapkan pada pilihan sulit, menjadi partai, menghidupkan kembali Masyumi, atau bersama ormas Islam lain membentuk partai. Dilema ini tergambar dari putusan *Khittah* di Ponorogo tahun 1969 dan *Khittah* Ujungpandang 1971. Putusan *Khittah* Ponorogo menyebut bahwa Muhammadiyah memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam. Untuk perjuangan politik (praktis) membentuk partai di luar Muhammadiyah. Namun, di antara keduanya tak ada relasi organisatoris, meskipun tetap mempunyai relasi ideologis. Seakan mengoreksi *Khittah* Ponorogo, lewat *Khittah* Ujungpandang Muhammadiyah mencoba menjaga jarak kembali dengan partai, meski masih memandang positif Parmusi dan partai lainnya.

*Khittah* 1971 diputuskan beberapa bulan selepas Pemilu 1971. Muhammadiyah mempunyai andil besar dalam pendirian Parmusi. Bahkan dua jabatan strategis dijabat kader Muhammadiyah, sebagai Ketua Umum Djarnawi Hadikusumo dan Sekjen Lukman Harun (*Ibid*). Ketika sidang Tanwir di Surabaya

---

<sup>6</sup><http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/05/26/noy68734-dilema-politik-muhammadiyah>.

tahun 1978, Muhammadiyah membuat *khittah* lebih tegas bahwa Muhammadiyah tak mempunyai relasi organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi parpol atau organisasi apa pun.

Paparan di atas menunjukkan, bahwa meski pada awalnya cukup rumit memposisikan antar Muhammadiyah dan politik, maka pada akhirnya pula bahwa relasi Muhammadiyah dan politik merupakan satu koin mata uang, antara satu sisi dan sisi lainnya tak bisa dipisahkan. Bedanya dengan model organisasi lain, Muhammadiyah tetap menjaga posisinya sebagai gerakan dakwah sosial keagamaan. Bukan sebuah tindakan “tidak jelas”, tetapi merupakan sikap tegas pada posisi seperti apa Muhammadiyah harus berdiri, dan itu adalah pilihan “politik”-nya.

## **2.7 Muhammadiyah dan Era Multi Partai**

Muhammadiyah mengalami Era Multi Partai tidak hanya masa Reformasi saja, tetapi pada masa Pemerintahan Muhammad Natsir, Muhammadiyah ikut serta, khususnya kader-kader Muhammadiyah, ikut meramaikan kontestasi peserta politik saat itu. Saat Era Multi Partai dibukan, kran demokrasi di Indonesia berkembang cepat dan pada puncaknya ditandai oleh munculnya banyak partai. Berikut perolehan suara dan penyebaran warga Muhammadiyah masa Multi Partai. Data tersebut di bawah ini diambil dari Data KPU.<sup>7</sup>

Tabel 2.6

Pemilu 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955  
Jumlah Suara dan Kursi (berdasarkan Partai Politik)

---

<sup>7</sup>[http://kpu.go.id/dmdocuments/modul\\_1d.pdf](http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf).

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Suara</b>	<b>% Suara</b>	<b>Kursi</b>
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15	Persatuan Pegawai Polisi (P3RI)	200.419	0,53	2
16	Murba	199.588	0,53	2
17	Baperki	178.887	0,47	1
18	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19	Grinda	154.792	0,41	1
20	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,23	1
24	AKUI	81.454	0,22	1
25	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28	R.Soedjono Prawirosoedarso	53.306	0,14	1
29	Lain lain	1.022.433	2,71	-

Penyebaran Muhammadiyah pada Pemilu tahun 1955, pada Masyumi dan Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Masa tahun ini, dipenuhi *euphoria* politik oleh karena pintu demokrasi dibuka secara lebar dan memungkinkannya memunculkan banyak kontestan partai politik di Indonesia.

Tabel 2.7  
Pemilu 1971 dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971

No	Nama Partai	Suara	% Suara	Kursi
1	Golkar	34.348.673	62,82	236
2	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733,359	1,34	7
7	Partai Katolik	603,740	1,10	3
8	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381,309	0,69	2
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338,403	0,61	
10	Murba	48,126	0,08	

Penyebaran Muhammadiyah pada Pemilu tahun 1971, pada Golongan Karya (Golkar), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia) dan Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII). Masa tahun ini, partai-partai politik mulai stabil dan mulai mengerucut pada pos-pos partai tertentu, dan tidak dipenuhi *euphoria* politik lagi.

Pada Era Multi Partai, tahun 1955 dan tahun 1971 terlihat secara jelas peran politik atau ”gerakan pilitik” Muhammadiyah cukup mewarnai kancah perpolitikan nasional.

Begitu juga Era Multi Partai pasca tumbangya Orde Baru dan memasuki Era Reformasi tahun 1999. Berikut data tahun Pemilu 1999, tahun 2004 dan tahun 2009.

Tabel 2.8  
Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan serentak pada tanggal 7 Juni 1999

No	Nama Partai	Suara	% Suara	Kursi
1	PDIP	35.689.073	153	154
2	Golkar	23.741.749	120	120
3	PPP	11.329.905	58	59
4	PKB	13.336.982	51	51
5	PAN	7.528.956	34	35
6	PBB	2.049.708	13	13
7	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8	PKP	1.065.686	4	6
9	PNU	679,179	5	3
10	PDKB	550,846	5	3
11	PBI	364,291	1	3
12	PDI	345,72	2	2
13	PP	655,052	1	1
14	PDR	427,854	1	1
15	PSII	375,92	1	1
16	PNI Front Marhaenis	365,176	1	1
17	PNI Massa Marhaen	345,629	1	1
18	IPKI	328,654	1	1
19	PKU	300,064	1	1
20	Masyumi	456,718	1	
21	PKD	216,675	1	
22	PNI Supeni	377,137		
23	Krisna	369,719		
24	Partai KAMI	289,489		
25	PUI	269,309		
26	PAY	213,979		

27	Partai Republik	328,564		
28	Partai MKGR	204,204		
29	PIB	192,712		
30	Partai SUNI	180,167		
31	PCD	168,087		
32	PSII 1905	152,82		
33	Masyumi Baru	152,589		
34	PNBI	149,136		
35	PUDI	140,98		
36	PBN	140,98		
37	PKM	104,385		
38	PND	96,984		
39	PADI	85,838		
40	PRD	78,73		
41	PPI	63,934		
42	PID	62,901		
43	Murba	62,006		
44	SPSI	61,105		
45	PUMI	49,839		
46	PSP	49,807		
47	PARI	54,79		
48	PILAR	40,517		

Penyebaran Muhammadiyah pada Pemilu tahun 1999, relatif lebih banyak menyebar pada beberapa partai politik, seperti Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), PSII, Masyumi, PUI, dan Masyumi Baru.

Tabel 2.9  
Pemilu 2004 dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004

No	Nama Partai	Suara	% Suara	Kursi
----	-------------	-------	------------	-------

1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	906,739	0,80	1
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	634,515	0,56	0
3	Partai Bulan Bintang	2.965.040	2,62	11
4	Partai Merdeka	839,705	0,74	0
5	Partai Persatuan Pembangunan	9.226.444	8,16	58
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1.310.207	1,16	4
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	669,835	0,59	0
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1.228.497	1,09	0
9	Partai Demokrat	8.437.868	7,46	55
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.420.085	1,26	1
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	844,48	0,75	1
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	890,98	0,79	0
13	Partai Amanat Nasional	7.255.331	6,41	53
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2.394.651	2,12	2
15	Partai Kebangkitan Bangsa	12.002.885	10,61	52
16	Partai Keadilan Sejahtera	8.149.457	7,20	45
17	Partai Bintang Reformasi	2.944.529	2,60	14
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20.710.006	18,31	109
19	Partai Damai Sejahtera	2.424.319	2,14	13
20	Partai Golongan Karya	24.461.104	21,62	128
21	Partai Patriot Pancasila	1.178.738	1,04	0
22	Partai Sarikat Indonesia	677,259	0,60	0
23	Partai Persatuan Daerah	656,473	0,58	0
24	Partai Pelopor	896,603	0,79	3

Penyebaran Muhammadiyah pada Pemilu tahun 2004, juga relatif lebih banyak menyebar pada beberapa partai politik, seperti Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai

Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Tabel 2.10  
Pemilu Tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009

No	Nama Partai	Suara	% Suara	Kursi
1	Partai Hati Nurani Rakyat	3.925.620	3,77	17
2	Partai Karya Peduli Bangsa	1.461.375	1,40	0
3	Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia	745.965	0,72	0
4	Partai Peduli Rakyat Nasional	1.260.950	1,21	0
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	4.642.795	4,46	26
6	Partai Barisan Nasional	760.712	0,73	0
7	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	936.133	0,90	0
8	Partai Keadilan Sejahtera	8.204.946	7,89	57
9	Partai Amanat Nasional	6.273.462	6,03	46
10	Partai Perjuangan Indonesia Baru	198.803	0,19	0
11	Partai Kedaulatan	438.030	0,42	0
12	Partai Persatuan Daerah	553.299	0,53	0
13	Partai Kebangkitan Bangsa	5.146.302	4,95	28
14	Partai Pemuda Indonesia	415.563	0,40	0
15	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	317.433	0,31	0
16	Partai Demokrasi Pembaruan	896.959	0,86	0
17	Partai Karya Perjuangan	351.571	0,34	0
18	Partai Matahari Bangsa	415.294	0,40	0
19	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	139.988	0,13	0
20	Partai Demokrasi Kebangsaan	671.356	0,65	0
21	Partai Republika Nusantara	631.814	0,61	0
22	Partai Pelopor	345.092	0,33	0
23	Partai Golongan Karya	15.031.497	14,45	106
24	Partai Persatuan Pembangunan	5.544.332	5,33	38
25	Partai Damai Sejahtera	1.522.032	1,46	0



26	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	468.856	0,45	0
27	Partai Bulan Bintang	1.864.642	1,79	0
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.576.388	14,01	94
29	Partai Bintang Reformasi	1.264.150	1,21	0
30	Partai Patriot	547.798	0,53	0
31	Partai Demokrat	21.655.295	20,81	148
32	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	325.771	0,31	0
33	Partai Indonesia Sejahtera	321.019	0,31	0
34	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	1.527.509	1,47	0
35	Partai Merdeka	111.609	0,11	0
36	Partai Nahdlatul Ummah Indonesia	146.831	0,14	0
37	Partai Sarikat Indonesia	141.558	0,14	0
38	Partai Buruh	265.369	0,26	0

Penyebaran Muhammadiyah pada Pemilu tahun 2009, juga relatif lebih banyak menyebar pada beberapa partai politik, seperti Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Matahari Bangsa, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Muhammadiyah memiliki peran penting dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Bukan sebagai peserta partai politik tetapi menyebar pada beberapa partai yang dianggapnya memiliki afiliasi bagi warga Muhammadiyah.

## **2.8 Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional (PAN)**

Pasca tumbangannya rezim Orde Baru, saat Tanwir Semarang 1998, Muhammadiyah membuat rekomendasi politik

yang salah satu butirnya ditafsir sebagai pembena bagi berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN). Rekomendasi ini mempercepat proses pembentukan PAN, dan Euforia politik warga Muhammadiyah seakan dilampiaskan ke PAN. Seakan sejarah terulang, Tanwir Denpasar 2002, Muhammadiyah kembali membuat keputusan normatif terkait posisi non-afiliatifnya. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tak mempunyai relasi organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi mana pun. Muhammadiyah mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritik sesuai fungsi *amar ma`ruf nahi munkar* demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.<sup>8</sup>

Pandangan tersebut adalah realitas politik yang kerap memaksa Muhammadiyah untuk bersikap. Sebagai organisasi yang hidup dalam sistem politik, tentu tak mungkin bagi Muhammadiyah berdiam diri. Namun, sikap Muhammadiyah ini terkadang dikritisi dan dibaca sebagai inkonsistensi Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan. Muhammadiyah dinilai kerap di(ter)goda masuk wilayah politik yang tidak seharusnya, yaitu politik yang dominan berorientasi pada kekuasaan dan politik dukung-mendukung pada kandidat tertentu, terlebih saat pemilihan presiden (*Ibid*).

Salah satu isu yang muncul menjelang Kongres IV Partai Amanat Nasional (PAN) di Bali akhir bulan ini adalah soal relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Din Syamsuddin, ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menolak adanya relasi antara PAN dan Muhammadiyah. Bahkan, dia

---

<sup>8</sup><http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/15/05/26/noy68734-dilema-politik-muhammadiyah>.

berpendapat, PAN tidak merepresentasikan aspirasi politik warga Muhammadiyah. Pernyataan Din itu layak dicermati, mengingat posisinya sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah. Sebenarnya, persoalan relasi antara PAN dan Muhammadiyah muncul sejak partai tersebut dilahirkan pada 1998. Namun, karena saat itu Muhammad Amien Rais sebagai pendiri PAN juga dikenal sebagai ketua umum Muhammadiyah, persoalan tersebut tidak menjadi isu penting. Bahkan, dalam perkembangannya, di banyak tempat, kader dan infrastruktur Muhammadiyah ikut memfasilitasi berdirinya PAN. Tetapi, sejak awal, PAN memang terbuka. Tidak hanya untuk warga Muhammadiyah, tetapi juga kalangan nonmuslim. Tercatat, di jajaran DPP PAN terdapat nama Albert Hasibuan dan Alvien Lie atau di Jawa Timur terdapat Mikel Liem dan banyak yang lain.<sup>9</sup>

Menurut DJoko Susilo,

“Relasi khusus Muhammadiyah dan PAN diperkuat keluarnya pernyataan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Semarang 1999 bahwa PAN adalah hasil ijtihad politik Muhammadiyah. Dengan kata lain, ada hubungan khusus antara Muhammadiyah dan PAN yang jika bukan hubungan organisatoris, setidaknya ada hubungan aspiratif, kultural, dan mungkin juga emosional. Pada masa kepemimpinan Achmad Syafii Maarif pada 2000–2005, hubungan PAN dengan Muhammadiyah masih cukup mesra. Hal itu tidak lepas dari sikap Buya Syafii yang selalu ”*ngayomi*” kadernya di mana saja.

---

<sup>9</sup><http://www2.jawapos.com/baca/opinidetail/13610/Relasi-PAN-dan-Muhammadiyah>.

Hubungan PAN dan Muhammadiyah baru bermasalah ketika Din Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum Muhammadiyah. Namun, gesekan itu hanya masih bersifat temporer, belum secara masal. Kondisi menjadi buruk karena dengan dorongan Din sejumlah aktivis PAN yang merasa "tidak mendapat tempat" pada masa PAN dipimpin Soetrisno Bachir mendirikan Partai Matahari Bangsa atau PMB. Hasilnya sangat mengecewakan. PMB mendapat suara kurang dari 1 persen pemilih nasional. Mungkin juga karena "gangguan" dari PMB itu, pada masa kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN memperoleh suara nasional terendah dalam sejarahnya, yakni hanya sekitar 6 juta pemilih. Kondisi baru pulih pada masa kepemimpinan Hatta Rajasa periode 2010–2015. Saat itu, PAN mendapat lebih dari 9 juta suara. Fakta tersebut menunjukkan keberhasilan Hatta Rajasa sekaligus mengindikasikan bahwa banyak konstituen Muhammadiyah yang "balik kandang", meski Din sebagai ketua umum Muhammadiyah tidak menunjukkan simpatinya kepada PAN" (*Ibid*).

Tampaknya, Pemilu tahun 2014 menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi di kalangan warga Muhammadiyah. Kesadaran itu muncul dan menegaskan bahwa partai politik merupakan representasi aspirasi kelompok yang konkret dalam hidup bernegara. Meskipun Muhammadiyah menyatakan tidak berafiliasi ke partai politik, namun fakta menunjukkan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) dianggap mampu menampung aspirasi politik bagi Muhammadiyah, khususnya aktivis politik.

Sikap politik elite Muhammadiyah tidaklah tunggal, melainkan plural. Gerakan Muhammadiyah yang bercorak modern, dinamis, dan progresif tidak selamanya berlaku normatif, bahwa aktivisnya pasti rasional. Faktor kepemimpinan yang bersifat kolektif-kolegial dan tidak adanya satu komando juga mempengaruhi variasi sikap politik elite Muhammadiyah. Kebijakan-kebijakan yang telah menjadi keputusan pun terkadang tidak begitu berpengaruh, seperti kasus kelahiran PAN maupun PMB yang tetap memunculkan perdebatan publik mengenai hubungannya dengan Muhammadiyah (Ridho al-Hamdi, 2012).

## **2.9 Dinamika dan Sikap Politik Muhammadiyah**

### **2.9.1 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keterlibatan Elite pada Politik Praktis**

Menelaah organisasi besar Muhammadiyah dari berbagai sudut pandang laksana menyelami "sumur tanpa dasar". Selalu ada hal baru yang bisa diungkap dan melahirkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Salah satu telaah itu adalah dari sisi aturan-aturan atau Surat Keputusan yang berkaitan dengan organisasi Persyarikatan. Surat Keputusan merupakan suatu regulasi atau kebijakan organisasi yang mesti dipatuhi oleh seluruh elemen organisasi di dalamnya. Kontekstualisasi dengan sub tema kajian ini adalah menelaah Surat Keputusan nomor 41 Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang regulasi atau kebijakan berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada. Telaah tentang Surat Keputusan nomor 41 itu penting sebagai acuan warga Muhammadiyah yang ikut berpartisipasi sebagai kontestan baik itu melalui partai politik atau sekadar menjadi simpatisan atau pendukung calon tertentu.

Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41/KEP/I.0/B/2013 tentang Perubahan Ketentuan Pencalonan dalam Pemilu dan Pemilukada dari Lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah memutuskan, bahwa:

1. Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Lingkungan Persyarikatan/Amal Usaha Muhammadiyah yang mencalonkan diri menjadi Anggota DPR RI/DPRD dinyatakan berhenti dari jabatannya dan dari statusnya sebagai anggota Pimpinan Persyarikatan dan/atau Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah, baik yang bersangkutan berhasil maupun tidak berhasil dalam pencalonan tersebut.
2. Untuk pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota, dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut: (a) apabila yang bersangkutan menduduki posisi sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah maka harus berhenti dari jabatannya tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, anggota Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatan yang selama ini diamanatkan kepadanya.

3. Pemberhentian atau reposisi anggota/Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Badan Pembina Harian, Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah, dan/atau Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah, sebagaimana disebutkan pada diktum pertama dan kedua, dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Pimpinan Amal Usaha yang mengangkatnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
4. Pemberhentian atau reposisi sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga berlaku sejak Ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU/KPUD).
5. Apabila terdapat Anggota Pimpinan Persyarikatan, Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya dalam lingkungan Muhammadiyah yang menjadi anggota Tim Sukses dalam pencalonan sebagaimana dimaksud Dalam diktum pertama dan kedua maka yang bersangkutan harus dinon-aktifkan dari jabatannya Sampai selesai kegiatan Pemilu/Pemilukada. Penonaktifan atau pengaktifan kembali dilakukan Melalui Surat Keputusan oleh Pimpinan Persyarikatan atau Amal Usaha yang mengangkatnya.
6. Pimpinan Persyarikatan beserta Pimpinan Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, Amal Usaha, dan institusi-institusi lainnya yang berada dalam lingkungan Muhammadiyah tidak diperbolehkan: (a) melibatkan organisasi dan Amal Usaha di lingkungan Persyarikatan untuk kepentingan politik praktis dalam kegiatan pencalonan sebagaimana pada diktum pertama dan kedua; (b) menggunakan lambang/symbol,

fasilitas, dana, dan infrastruktur yang dimiliki Persyarikatan dan Amal Usaha dalam kegiatan pencalonan dimaksud.

7. Keputusan ini disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Pesyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah diseluruh tingkatan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Segala ketentuan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
9. Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan kewenangannya dapat mengambil kebijakan/keputusan khusus demi kemaslahatan organisasi.
10. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diubah dengan keputusan lain (Surat Keputusan Nomor 41 Pimpinan Pusat Muhammadiyah).

Mencermati Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 41 tahun 2013, pada dasarnya memiliki ketegasan sikap yang jelas, namun masih ”memberikan” ruang berpolitik bagi warga Muhammadiyah yang menjadi elite baik dari Pimpinan Pusat hingga Pimpinan Ranting dan Organisasi Otonom lainnya. Tanpa harus keluar dari keanggotaan Muhammadiyah, tetapi masih duduk dikepengurusan sebagai anggota. Pengertian tersebut dapat dilihat pada poin 2, bahwa ”pencalonan Dewan Perwakilan Daerah RI serta Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Walikota/Wakil Walikota, dan Calon Bupati/Wakil Bupati, berlaku ketentuan berikut: (a) apabila yang bersangkutan menduduki posisi



sebagai Pimpinan Harian pada Pimpinan Persyarikatan, Unsur Pembantu Pimpinan Pesyarikatan, Organisasi Otonom, Badan Pembina Harian, dan Pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah maka harus berhenti dari jabatannya tetapi tetap menjadi anggota Pimpinan Persyarikatan, anggota Unsur Pembantu Pimpinan Pesyarikatan, anggota Organisasi Otonom, anggota Badan Pembina Harian, dan/atau Tenaga Tetap/Tidak Tetap di Amal Usaha Muhammadiyah; (b) di luar posisi tersebut pada huruf (a) diperbolehkan untuk tetap menduduki posisi dan statusnya sesuai dengan jabatan yang selama ini diamanatkan kepadanya”.

Pandangan atau keputusan tersebut, sangat cerdas dan memiliki muatan strategis dalam keputusan organisasi. Pasalnya, Muhammadiyah menyadari bahwa politik merupakan entitas yang tak bisa dipisahkan dari organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah sosial keagamaan. Maka keputusan-keputusan yang dihasilkannya pun tidak secara permanen atau kaku di dalam penerapannya. Wrga Muhammadiyah khususnya elite politik Muhammadiyah mesti cerdas dan bijaksana di dalam memahami Surat Keputusan tersebut sebagai suatu keputusan organisasi yang mengikat tetapi masih tetap memberikan ruang ekspresif dalam bepolitik praktis. Itulah makanya sejak awal kemerdekaan atau tepatnya dibukanya kran multi partai (tahun 1955), Muhammadiyah senantiasa berperan aktif di dalam partisipasinya sebagai ”partisipasi politik” di tanah air. Hasrat politik Muhammadiyah hanya satu, bagaimana ajaran agama Islam itu dapat dilaksanakan oleh muslim Indonesia dengan sebenar-benarnya, dan itu dibingkai dalam *amar ma`ruf nahi munkar* sebagai dasar dan semangat dakwahnya.

## 2.9.2 Muhammadiyah dan Politik: Ambivalensikah?

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab-bab sebelumnya, bahwa Muhammadiyah tidak alergi politik, terlihat dari kontribusi dan peran politik yang dilakukan oleh warga Muhammadiyah yang menjadi kader-kader terbaiknya di dalam ikut serta membangun bangsa dan Negara agar berjalan sesuai dengan tata nilai yang islami, yakni menjunjung tinggi ajaran Islam, menjalankan proses demokrasi, dan menciptakan *good governance*.

Cukup dilematis, manakala Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan *maklumat* berupa Surat Keputusan bernomor 41 tentang keikutsertaan warga Muhammadiyah dalam Pemilu dan Pemilukada. Karena bagi yang tidak kritis terhadap bunyi poin-poinnya dalam Surat Keputusan itu cenderung menganggap larangan berpolitik praktis. Tetapi jika dibaca lebih teliti, maka akan terlihat bahwa poin-poin itu merupakan ikhtiar Persyarikatan menjaga keberlangsungan dan keseimbangan dalam organisasi Muhammadiyah, tanpa harus “membunuh” hasrat berpolitik warga Muhammadiyah.

Pada masa kepemimpinan Muhammadiyah di tangan Din Syamsuddin, seolah ada jarak antara Muhammadiyah dan politik, dalam konteks ini antara Muhammadiyah dan PAN, meski pada akhirnya melahirkan Partai Matahari Bangsa. Membaca kepemimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penting kiranya memahami secara teliti tiap-tiap poinnya yang tertera dalam Surat Keputusan tersebut. Sebagai organisasi sosial dakwah keagamaan, Muhammadiyah terlatih menjalankan roda organisasi secara

manajerial. Ini yang harus pertama kali dipahami. Kedua, langkah-langkah teknis berkaitan dengan keputusan apapun tentu melalui pertimbangan organisasi yang matang agar dikemudian hari tidak menjadi masalah. Perhatikan respon Muhammadiyah pada perpolitikan sejak tahun politik 1955 masa Era Multi Partai hingga saat ini.

Muhammadiyah tetap konsisten menjaga *marwah politik* tetap pada sikap bahwa ada garis yang jelas antara organisasi dakwah dan politik praktis. Pernyataan bahwa ada batas yang jelas bukan berarti memisahkan antara Muhammadiyah dan politik, tetapi mengatur regulasi atau kebijakannya agar tidak terjadi *overlapping* sehingga Muhammadiyah yang dirugikan. Maka agar *win-win solution* itu tercipta, dibuatlah regulasi atau kebijakan itu.